

Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 3, Juni 2024, Halaman 120-130
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.12591517)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12591517>

Power dalam Politik Global Pasca Perang Dingin (Studi Kasus Hegemoni AS dan Kebangkitan Tiongkok)

Mahdavikia Cokro Pratomo^{1*}, Nabilla Adika Putri¹

¹Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, UPN “Veteran” Jakarta
*Email korespondensi: 2110413107@mahasiswa.upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pasca Perang Dunia II, politik global dihadapkan oleh tantangan baru dengan kemunculan blok barat dan blok timur hingga terjadi peperangan ideologi antara Liberalisme - Kapitalisme oleh Amerika Serikat dengan ideologi Komunisme oleh Uni Soviet. Kemenangan Amerika Serikat atas Uni Soviet dalam Perang Dingin memberikan perubahan pada tatanan politik global yang mengalami transisi dari bipolaritas menjadi multipolaritas. Hegemoni AS dalam bidang militer, diplomasi, ekonomi, maupun kebijakan-kebijakan melemahkan posisinya sebagai negara hegemon disusul dengan kebangkitan Tiongkok sebagai pesaing AS dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Tujuan penulisan artikel ini untuk melakukan analisis terhadap pengaruh hegemoni yang dilakukan Amerika Serikat terhadap dinamika politik global dengan mengeksplorasi dinamika politik multipolar berfokus pada kebangkitan Tiongkok sebagai pesaing utama negara AS. Artikel ini memiliki pendekatan deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode penelitian berupa studi kasus dan memperoleh sumber data dari kajian literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hegemoni AS mengalami penurunan akibat melemahnya ekonomi AS khususnya pasca peristiwa 9/11 karena melakukan peperangan melawan terorisme. Rivalitas ditunjukkan oleh AS yang berupaya mempertahankan status sebagai negara hegemon dengan Tiongkok yang berusaha menjadi negara hegemon mengalahkan AS melalui persaingan pada bidang ekonomi, militer, dan teknologi.

Kata Kunci: Hegemoni, Multipolaritas, Kebangkitan Tiongkok

ABSTRACT

After World War II, global politics was faced with new challenges with the emergence of the Western Bloc and the Eastern Bloc, leading to an ideological war between Liberalism - Capitalism by the United States and the ideology of Communism by the Soviet Union. The victory of the United States over the Soviet Union in the Cold War changed the global political order, which transitioned from bipolarity to multipolarity. US hegemony in the fields of military, diplomacy, economics, and policies weakened its position as a hegemon state followed by the rise of China as a US competitor with rapid economic growth. The purpose of writing this article is to analyse the influence of hegemony by the United States on global political dynamics by exploring the dynamics of multipolar politics focusing on the rise of China as the main competitor of the US. This article has a descriptive-qualitative approach using a research method in the form of a case study and obtaining data sources from literature review. The results of this study show that US hegemony has decreased due to the weakening of the US economy, especially after 9/11 because of the war on terrorism. Rivalry is shown by the US trying to maintain its status as a hegemon state with China trying to become a hegemon state to beat the US through competition in the economic, military and technological fields.

Keywords: *Hegemony, Multipolarity, The rise of China*

Article Info

Received date: 20 Juni 2024

Revised date: 26 Juni 2024

Accepted date: 28 Juni 2024

PENDAHULUAN

Berakhir nya perang dunia II tidak menunjukkan hasil akhir dari dinamika politik internasional yang telah terjadi selama beberapa dekade belakangan. Dunia dihadapkan dengan babak baru dalam persaingan politik internasional pasca kekalahan blok poros dan kemenangan dari blok sekutu. Kemenangan blok sekutu yang berisi negara-negara dengan kekuatan yang besar menimbulkan persaingan antar negara dalam blok tersebut. Terlahir blok baru yang menjadi kekuatan besar pasca kemenangan blok sekutu yaitu blok barat dengan Amerika Serikat sebagai simbol kekuatan dari blok tersebut dan dihadapkan dengan blok timur dengan Uni Soviet sebagai pengendali dalam blok tersebut. Kemunculan kedua blok tersebut melahirkan persaingan baru dalam bentuk ideologi yang saling bertentangan. Blok barat dengan ideologi liberalisme - Kapitalisme berusaha untuk menanamkan pemahaman tersebut di seluruh dunia, sementara blok timur dengan ideologi Komunisme berusaha menangkal penyebaran ideologi dari blok barat. Kedua blok tersebut yakni blok barat dan blok timur berusaha untuk memperluas posisi dan pengaruh nya di wilayah - wilayah strategis. Amerika Serikat sebagai pion dari blok barat ingin menyebarkan model ekonomi pasar bebas sebagai pemulihan kondisi pasca perang namun disisi lain Uni Soviet memberikan penawaran model sosialis untuk digunakan sebagai model suatu negara. Persaingan antar 2 negara dalam melakukan penyebaran ideologi dikenal dengan istilah *Cold War* atau perang dingin (Enh dan Hamzah, 2011).

Pada akhir nya, perang antar ideologi yang terjadi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat atau dikenal dengan istilah Perang dingin dimenangkan oleh Amerika Serikat dengan menyebarkan ideologi liberalisme dan kapitalisme pasar di seluruh dunia. Keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991 menjadi titik awal dari hegemoni Amerika Serikat di seluruh dunia dan menjadi tanda bahwa model ekonomi pasar bebas adalah sistem yang mampu beradaptasi di seluruh dunia. Dampak dari berakhirnya perang dingin dan keruntuhan Uni Soviet memberikan jalan besar untuk Amerika Serikat untuk memperkuat posisi nya dalam kancah perpolitikan global sebagai negara yang menghegemoni (Hasyaimi, 2016). Berakhirnya perang ideologi tersebut memberikan perubahan pada struktur tatanan politik global menuju era baru dengan kebangkitan negara-negara kolonial menuju bentuk multipolaritas dengan permasalahan global yang kompleks.

Runtuh nya Uni Soviet yang menandai berakhirnya perang dingin, politik global diperlihatkan dengan adanya transisi dari sistem bipolaritas yang sebelum nya di dominasi oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet menuju sistem multipolaritas dengan muncul nya kebangkitan negara-negara lain (Yuanita, Ribawati, Sumantri, 2024). Selama proses perang dingin, Amerika Serikat membentuk aliansi di kawasan eropa dengan membentuk *NATO* (*North Atlantic Treaty Organization*) untuk mempertahankan eksistensi nya melawan Uni Soviet dan aliansi nya yang tergabung dalam pakta Warsawa. Amerika Serikat memberikan pengaruh politik dan Ekonomi dengan memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada negara yang menjadi bagian dari aliansi tersebut. Hal ini berdampak pada menguatnya negara-negara di kawasan Eropa Barat dengan integrasi ekonomi yang erat dan berperan dalam melakukan perdagangan internasional.

Muncul nya Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi baru pasca berakhirnya perang dingin menjadi pertanda muncul nya sistem multipolaritas dalam dunia internasional. Berkembang pesat nya kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki Tiongkok didorong oleh adanya reformasi yang dilakukan pada tahun 1970an. Mula nya Tiongkok yang sebelumnya serupa dengan Uni Soviet yang memiliki ideologi komunis, melakukan reformasi dengan menciptakan model satu negara dua sistem. Presiden saat itu, Deng Xiaoping memberlakukan model sosialis dan kapitalisme secara bersama-sama dengan mekanisme menggunakan kapitalisme untuk menjalankan perekonomian dengan mekanisme melakukan

politik pintu terbuka untuk menarik investor asing dan menjalin hubungan dengan negara lain (Absor, Wahyudin, Permana, 2022).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh penulis untuk memperoleh informasi terkait topik penelitian sekaligus sebagai pembanding untuk memperoleh inovasi baru bagi penelitian selanjutnya. Penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian penulis. Penelitian Putra dkk (2023) berjudul *Hegemoni Amerika Serikat di Afghanistan: Economic Turmoil and Food Insecurity Dilemma* memiliki pembahasan terkait pengaruh hegemon dari Amerika Serikat terhadap kondisi Afghanistan yang berdampak pada bencana ekonomi dan politik hingga terjadinya kerawanan pangan. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan dasar teori hegemoni milik Antonio Gramsci. Berdasarkan penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa keberadaan Amerika Serikat sebagai negara hegemon menciptakan bencana dalam suatu negara, dalam penelitian ini adalah Afghanistan. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat menanamkan kekuasaan pada negara-negara bawah sehingga menjadi ancaman bagi stabilitas negara internasional, termasuk Afghanistan. Terjadinya peristiwa 9/11 pada tahun 2001 menjadi alasan AS mengeluarkan kebijakan *War on Terror (Wot)* sebagai kebijakan yang digunakan untuk menumpas negara yang dianggap memberikan perlindungan terhadap gerakan terorisme. AS memutuskan untuk melakukan invasi kepada Afghanistan sebagai perwujudan kepentingan nasional dengan melakukan perang terhadap kelompok Al-Qaeda yang diduga sebagai dalang peristiwa penyerangan *World Trade Center (WTC)* pada 11 September 2001 dimana kelompok tersebut berada di wilayah Afghanistan. AS berupaya menundukkan Afghanistan dengan melakukan blokade secara ekonomi sehingga Afghanistan tidak dapat melakukan peningkatan modal usaha untuk memutar roda aktivitas dan konsumsi masyarakat serta terhambatnya bantuan internasional yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan negara Afghanistan. Penelitian Putra dkk memiliki persamaan dengan penelitian ini yakni persamaan dalam membahas pengaruh kekuatan dan kekuasaan Amerika Serikat terhadap kondisi sebuah negara dengan mengacu pada teori hegemoni Antonio Gramsci. Perbedaannya, penelitian Putra dkk melihat bagaimana persoalan yang muncul terhadap ketahanan pangan di Afghanistan karena hegemoni AS sebagai faktor eksternal. Sedangkan, penelitian ini berfokus pada dampak kebijakan dari melawan terorisme terhadap menurunnya hegemoni Amerika Serikat.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Adiwilaga dkk (2023) dengan judul *Implikasi Rivalitas Amerika Serikat - Republik Rakyat China terhadap Posisi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan)* memiliki pembahasan terkait konsolidasi dan internalitas China yang perlahan menggeser status Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui apa saja upaya yang dilakukan China hingga dapat bersaing dengan eksistensi Amerika sebagai poros ekonomi dunia. Kebangkitan China menimbulkan kekhawatiran AS akan pergeseran posisinya yang menyebabkan timbulnya konfrontasi antara AS dan China. Persaingan dilakukan dalam berbagai bidang, seperti militer, ekonomi, hingga konflik teritorial yang dalam penelitian ini berfokus pada Laut Cina Selatan dan dampaknya terhadap *Proxy War* di berbagai bidang. Meningkatnya prestasi yang dilakukan China beriringan dengan kemunduran AS akibat krisis ekonomi akibat hutang yang besar. Persamaan penelitian Adiwilaga dkk dengan penelitian ini adalah membahas upaya kebangkitan China dan bentuk persaingan yang dilakukan AS dengan China. Namun, perbedaannya adalah pada penelitian Adiwilaga berfokus pada persaingan dalam mendapatkan klaim atas wilayah Laut Cina Selatan sebagai komoditi strategis dengan sumber daya laut yang melimpah. Sedangkan,

penelitian ini berfokus pada apa yang menyebabkan China dapat menggeser posisi status negara adidaya AS dan bagaimana bentuk persaingan antara AS dengan China.

Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai suatu sistem aliansi kelas dimana terdapat kelas dominan yang berposisi sebagai pemimpin dengan memenangkan keyakinan mereka. Cara kerja hegemoni melalui paksaan dan persetujuan. Konteks ini memiliki makna adanya kelas penguasa atau kelompok dominan yang dapat mengubah nilai dan kepentingan menjadi nilai bersama bagi seluruh masyarakat. Hal ini berpengaruh kepada seluruh sistem nilai, kepercayaan, sikap, dan etika kelas penguasa dalam tatanan masyarakat (Gramsci, 1971). Dalam konteks hubungan internasional, Robert Keohane berpendapat hegemoni adalah suatu usaha dalam mencapai kekuatan terbesar untuk dapat memanipulasi negara lain. Usaha untuk mencapai hegemoni dapat dilakukan dengan dua kekuatan yaitu: (1) *hard power*, sebagai suatu usaha melalui kekerasan dan sektor militer untuk menunjukkan dominasi terhadap negara dibawahnya; (2) *soft power*, sebagai usaha menggunakan instrumen lunak seperti melalui diplomasi dan sektor ekonomi untuk mendapatkan kekuasaan sekaligus memenuhi kepentingan nasional negaranya. Amerika Serikat memenuhi kedua karakteristik tersebut melalui kekuatan militernya yang mencapai list pertama *Global Fire Power* dan sistem ekonomi terkuat di mata dunia. Teori hegemoni dikembangkan oleh aliran Gramscian menjadi Neo-Gramscianism dengan melihat hegemoni yang terjadi memiliki fokus terhadap akumulasi kapital dan perekonomian. Negara hegemoni menjadikan instrumen tersebut untuk mendominasi negara bawah melalui blokade ekonomi maupun bantuan ekonomi (Putra dkk, 2023).

Hegemoni memiliki empat model kekuasaan, pertama hegemoni berbasis paksaan (*outside/out model*). Model ini mengacu kepada kemampuan kekuasaan seorang kelompok atau aktor terhadap kelompok atau aktor lainnya. Dalam konteks ini kekuasaan tidak berkaitan dengan pembentukan identitas ataupun kepercayaan, melainkan atas kekuasaan yang dimiliki oleh pihak hegemonik yakni negara adidaya dalam sistem internasional. Kedua hegemoni berbasis persetujuan (model luar/dalam) mengasumsikan adanya dua kekuatan hegemoni. Kekuasaan pada jenis hegemoni ini berkaitan dengan nilai, preferensi, identitas, dan keyakinan. Hegemoni tidak dinilai dari kepemilikan dan keunggulan sumber daya namun melihat pada bagaimana kekuatan hegemoni tersebut dalam mempengaruhi kepercayaan berbagai pihak dalam sistem hegemoni. Ketiga hegemoni berbasis atraksi (*model inside*) merupakan model hegemoni yang bersifat tarik menarik didasarkan terhadap keberadaan dua pihak yang secara jelas melakukan hegemoni dan penggunaan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain. Keempat hegemoni berbasis kehidupan yakni hegemoni dipahami sebagai alat kekuasaan yang terdesentralisasi untuk mengatur kehidupan manusia dari dalam. Terdapat kelompok yang mempengaruhi nilai-nilai dan preferensi pada pihak yang di bawahnya (Ashraf, 2023).

Terdapat dua pandangan yang dapat digunakan dalam menjelaskan stabilitas hegemoni. Pertama adalah pandangan neorealis yang digunakan Robert Gilpin dalam menjelaskan stabilitas hegemoni pada ranah kerjasama internasional. Dalam mencapai dominasi, suatu negara dapat melakukan perdagangan dan kerjasama internasional. Negara yang hegemon akan memanfaatkan kekuatan militernya dan mendorong negara lain untuk menjalin kerja sama dan mengubah sistem yang berputar terhadap keuntungannya sendiri. Negara hegemon ini akan menjalin kerja sama dengan melihat kelemahan yang dimiliki negara lain, dan menawarkan bantuan melalui perjanjian kerja sama. Pandangan kedua adalah liberalis yang setuju terhadap pandangan neorealis bahwa negara hegemon memiliki kekuatan dalam mengatur sistem kerja sama antar negara. Bedanya liberalis menekankan pada penggunaan kekuatan secara *soft power* melalui ekonomi maupun politik untuk mendorong negara yang lemah menjalin kerja sama (Hasyaimi, 2016). Giplin (dalam Ashraf

(2023) mendefinisikan hegemoni dalam realisme klasik mengasumsikan adanya status ketidakseimbangan kekuasaan pada sistem internasional. Sebuah negara dinilai berdasarkan kepemilikan atas kekuasaan materialnya yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan negara lain. Teori stabilitas hegemoni berasumsi bahwa ketika terjadi kemunduran atas kekuatan hegemoni dari suatu negara maka akan diiringi dengan munculnya negara baru sebagai pesaing, proses perang akan meningkat, dan kemungkinan besar terjadi perubahan besar atas rezim akibat pecahnya perang dunia atau hegemoni. Perang antara negara hegemoni dengan negara pesaing akan menciptakan sistem internasional atau sistem hegemoni baru.

Menurut Heywood (2011) menjelaskan bahwa Multipolaritas adalah sebuah konsep dalam hubungan internasional yang mengacu pada sistem di mana terdapat tiga atau lebih pusat kekuatan yang signifikan. Haass (2008) melihat bahwa dalam sistem multipolar tidak ada dominasi kekuatan dari satu negara karena hal tersebut akan menciptakan unipolaritas dan juga tidak ada kekuatan yang berputar hanya pada dua negara karena akan menciptakan bipolaritas. Sistem multipolaritas memiliki sifat yang cenderung bekerja sama bahkan mengambil bentuk konsert kekuatan dimana didalamnya terdapat beberapa kekuatan utama yang bekerja dan akan memberikan sanksi bagi negara yang melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan main.

Menurut pandangan neorealisme, sistem multipolar cenderung menciptakan ketidakstabilan dan meningkatkan potensi konflik. Kaum neorealis berpendapat bahwa sistem multipolar memiliki sifat yang anarkis dimana negara-negara dapat menciptakan persaingan untuk memperluas pengaruhnya. Kondisi yang tidak dapat diprediksi ini dinilai dapat memicu terjadinya konflik dan ketegangan antar negara-negara besar. Kekuatan yang seimbang sulit dipertahankan dan sistem ini sangat rentan terhadap gangguan dan perubahan yang cepat. Disisi lain, kelompok liberalis melihat bahwa sistem multipolar adalah kesempatan untuk mendorong multilateralisme yang efektif. Kaum liberalisme berargumen bahwa adanya pembagian kekuatan yang merata antar aktor global dapat menciptakan kerjasama dan melakukan kemitraan yang kondusif dengan mencegah adanya dominasi dari satu aktor. Dengan demikian, mereka melihat multipolaritas sebagai langkah menuju dunia yang lebih stabil dan terintegrasi, meskipun dengan tantangan dan kompleksitas sendiri dalam menjaga keseimbangan kekuatan dan keamanan global.

Pada tahap berikutnya penelitian akan mengeksplorasi dinamika politik multipolar yang memiliki fokus pada Tiongkok yang telah muncul sebagai pesaing utama negara hegemon Amerika Serikat. Peneliti akan melakukan analisis yang mencakup perkembangan militer dan ekonomi Tiongkok serta melihat strategi kebijakan politik luar negerinya dalam menunjukkan posisinya dalam tingkat global. Dalam hal ini, penelitian akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan tentang bagaimana kebangkitan Tiongkok memberikan pengaruh terhadap distribusi kekuasaan global dan berupaya menantang hegemoni Amerika Serikat serta memicu perubahan dinamika politik Internasional. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis terkait pengaruh hegemoni yang dilakukan Amerika Serikat terhadap dinamika politik global pasca perang dingin yang berdampak pada munculnya struktur politik baru yaitu sistem multipolar. Fokus penelitian akan kepada kebangkitan Tiongkok sebagai pesaing hegemoni Amerika Serikat. Penelitian akan melakukan analisis dominasi Amerika Serikat dalam politik global, menelusuri dampaknya dalam berbagai aspek seperti ekonomi, militer, dan diplomasi. Dalam hal ini, penelitian akan melihat strategi dan kebijakan Amerika Serikat yang memperkuat atau melemahkan posisinya sebagai negara hegemon dan dampaknya dalam membentuk hubungan antarnegara dan dinamika geopolitik secara global.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk mempermudah penulis dalam menggambarkan dan menguraikan perkembangan hegemoni Amerika Serikat pasca Perang Dingin dan kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan global yang menciptakan tatanan dunia baru dengan sistem multipolaritas. Penulis menjadikan teori Hegemoni dan Multipolaritas untuk mengembangkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Sehingga penulis dapat menganalisis dan mengkaji kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan global dan relevansinya dengan hegemoni Amerika Serikat. Data yang penulis gunakan melalui studi literatur atau studi kepustakaan dengan informasi dan sumber data yang diperoleh berasal dari jurnal penelitian, buku, artikel resmi, dan data kepustakaan lain yang relevan dengan masalah yang dikaji dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hegemoni Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi negara dengan julukan super power atau disebut sebagai negara adidaya dengan kekuatan militer, politik, ekonomi, dan teknologi tinggi yang dimilikinya. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat terus maju dan berkembang menguasai dunia perindustrian, menjadi pusat teknologi dunia, serta memperluas pengaruhnya pasca keruntuhan Uni Soviet. Sejak tahun 1990, Amerika Serikat dijuluki sebagai polisi dunia dibuktikan dengan keikutsertaannya dalam konflik-konflik di berbagai negara, seperti Haiti, Liberia, Kosovo, Haiti, Somalia, dan Perang Teluk Pertama (Hussein, 2013). Pada tahun 1970-an di Somalia terjadi konflik yang melibatkan tentara AS sebagai pasukan yang berusaha memulihkan ketertiban di Somalia. Perang saudara yang terjadi menewaskan puluhan ribu masyarakat Somalia ditambah mereka yang meninggal akibat kelaparan. Tahun 1992 Amerika membentuk operasi penjaga perdamaian atau disebut "*Operation Restore Hope*" yang akhirnya dikenal dengan sebutan *United Task Force (UNITAF)*. Operasi ini sebagai bentuk misi kemanusiaan dengan melakukan pengiriman bantuan makanan yang dijamin oleh penjaga perdamaian PBB misi tersebut tidak akan berakhir hingga bantuan sampai di tangan masyarakat (Hasyaimi, 2016). Ketidakstabilan keamanan dan politik di Somalia hingga tahun 2004, melahirkan *Transitional Federal Government (TFG)* dengan tujuan pemerintah Somalia dapat diakui secara internasional. Adanya gerakan bersenjata di Somalia menghalangi keberhasilan program TFG tersebut. Hal ini memberikan kesempatan bagi AS sebagai negara dengan kekuatan militer yang besar memberikan jaminan keamanan kepada Somalia. Tak hanya itu, AS juga memberikan bantuan pelatihan militer terhadap pasukan pertahanan Somalia. Bantuan-bantuan yang diberikan AS memberikan pengaruh terhadap eksistensinya di Somalia, dibuktikan pada pemilihan Presiden Somalia Hassan Sheikh Mohamud yang dipilih secara langsung oleh rakyat Somalia. Nilai-nilai politik demokrasi yang dibawa Amerika Serikat berhasil membentuk jalannya pemerintahan Somalia itu sendiri. Amerika Serikat menggunakan sistem soft power-nya untuk menguasai dan mendapatkan simpati melalui bantuan baik secara ekonomi maupun militer kepada negara yang membutuhkan. Hal ini sekaligus menjadikan AS semakin kuat posisinya dalam kancah internasional (Safitri, 2014).

Kekuatan militer adalah landasan strategi Amerika untuk mempertahankan hegemoni. Berbagai wilayah di dunia telah menyaksikan peningkatan intervensi militer sepihak Amerika. Selain penempatan pasukan AS di berbagai belahan dunia, dimensi politik hegemoni Amerika juga terfokus pada permusuhan internasional dalam konteks melawan terorisme. Bush meluncurkan kebijakan luar negeri bernama *Global War on Terror (GWOT)* setelah terjadinya peristiwa 9/11 atau serangan 11 September 2001. GWOT AS dibentuk dengan tujuan menumpas terorisme di dunia yang memberikan hambatan terhadap AS dalam

menjalankan kepentingan nasionalnya di wilayah Timur Tengah. Misi Amerika yang mengatasnamakan melawan terorisme AS melakukan operasi militer besar-besaran ke wilayah Afghanistan karena dinilai melindungi Al Qaeda sebagai pihak yang dituding merupakan pelaku penyerangan gedung kembar *World Trade Center (WTC)* (Putra dkk, 2023). Di Afghanistan terdapat sebuah kelompok agama dan politik yang bersifat konservatif sejak tahun 1990-an dengan sebutan Taliban. Taliban menjadi kelompok dengan gerakan fundamental islam dianggap Amerika Serikat sebagai kelompok yang memberikan perlindungan pimpinan teroris Al-Qaeda yakni Osama bin Laden menjadikan kelompok taliban kemudian dicap AS sebagai gerakan teror. Alasan ini mendasari AS melakukan penyerangan ke Afghanistan dengan melakukan Operasi *Enduring Freedom Afghanistan (OEF-A)* dan Operasi Tora Bora 2001 yang berlanjut dengan operasi militer lainnya hingga tahun 2010. Rangkaian invasi militer Amerika dengan dukungan sekutu AS di NATO tidak cukup kuat melemahkan kekuatan Taliban. Kekuatan Taliban semakin terlihat ketika tahun 2017 kelompok ini melancarkan Operasi Mansori, yakni melakukan penyerangan kepada pasukan asing dan menguasai beberapa distrik penting di Afghanistan. Kondisi afghanistan yang semakin kacau diperparah dengan munculnya *Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)* yang sudah beroperasi di Irak dan Suriah (Anugerah dan Purba, 2021).

Pada tahun 2018 perubahan terjadi pada pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Afghanistan. Kebijakan yang didominasi oleh operasi militer berbalik menjadi upaya yang dapat dilakukan untuk negosiasi damai dengan kelompok Taliban. Negosiasi damai terjadi secara intensif hingga mencapai kesepakatan damai antara Taliban dan Amerika Serikat pada 29 Februari 2020 di Doha, Qatar. Beberapa poin penting yang tercantum dalam kesepakatan damai adalah penarikan secara bertahap terhadap pasukan AS dan koalisinya, perencanaan negosiasi intra-Afghanistan guna menciptakan situasi Afghanistan yang lebih damai, dan menjadikan Afghanistan terlindungi dari keberadaan kelompok teroris yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas politik Afghanistan. Perubahan pada kebijakan luar negeri didasari oleh dua faktor. Pertama, invasi AS terhadap Afganistan memakan anggaran yang sangat besar sepanjang tahun 2001-2009 menyentuh US\$ 2 Triliun. Pengeluaran ini digunakan untuk pembangunan pangkalan militer, pos-pos yang perlu didanai, pemulihan dalam sektor ekonomi Afghanistan, biaya perlindungan keamanan pasukan, dan biaya apresiasi kepada pasukan AS yang bertugas. Tidak hanya biaya yang keluar dengan jumlah besar, jumlah prajurit yang gugur juga menjadi persoalan berdampak pada krisisnya jumlah pasukan AS. Faktor kedua berasal dari sistem internasional. AS yang dikenal sebagai negara hegemoni seharusnya memiliki kapabilitas dan kapasitas militer yang unggul dalam berbagai sektor, utamanya militer dan ekonomi. Ditengah invasi yang dilakukan AS terhadap kelompok Taliban, Cina dan Rusia semakin menancapkan eksistensinya. AS terlibat perang dagang dengan China serta perebutan pengaruh di wilayah Asia Tengah dan Indo-Pasifik dan pengaruh Rusia yang semakin membesar. Kebangkitan dua negara besar membuat AS semakin tidak fokus dalam mempertahankan status hegemoni. Seiring dengan anggaran dan prajurit yang semakin habis dalam menduduki Afghanistan, pada akhirnya Amerika terdorong melakukan perdamaian dengan Taliban yang diakhiri dengan penarikan total pasukan AS pada akhir 2021. Sebagai negara adidaya, pilihan negosiasi perdamaian menjadi bagian dari strategi diplomasi dalam mencapai kepentingan nasional, yakni keluar dari *front* Afghanistan yang banyak menyedot sumber daya secara human *cost* dan finansial. Peristiwa ini memberikan citra buruk AS dalam kancah internasional, bahwa AS sebagai negara adidaya gagal membentuk Afghanistan menjadi negara demokrasi dengan memberantas terorisme (Anugerah dan Purba, 2021).

AS memanfaatkan peristiwa 9/11 untuk memperketat hegemoni Amerika atas dunia dalam hal sentralitas kekuatan militer Amerika, kendali ekonomi global, dan dukungan

terhadap penyebaran sistem nilai budaya Barat. Peristiwa 9/11 nyatanya memberikan dampak negatif terhadap hegemoni Amerika secara global dan posisinya. 11 September menandai awal dari berakhirnya hegemoni Amerika, atau berakhirnya perannya sebagai negara adidaya. Intervensi yang dilakukan pada Afghanistan dalam perang melawan al-Qaeda tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dalam melawan perang terorisme. Tidak hanya invasi dengan metode GWOT pada Afghanistan, invasi lain juga dilakukan di negara Irak, Libya, dan Suriah memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian Amerika. Perang melawan terorisme merupakan salah satu penyebab krisis keuangan yang melanda Amerika pada tahun 2008. Pemerintahan AS menghabiskan dana sangat besar untuk perang-perang yang pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Sentimen anti-Amerika menjadi opini publik pada masa pemerintahan Bush dan semakin meningkat seiring dengan upaya kontra-terorisme yang dilakukan AS meluas. Hal ini berdampak pada banyaknya negara yang berbalik menentang AS. Peristiwa ini melemahkan militer, ekonomi, dan reputasi AS di mata dunia akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan AS dan skandal terhadap masyarakat di wilayah perang. Legitimasi kekuatan politik dan budaya Amerika juga terkikis setelah Amerika menggunakan posisinya sebagai negara hegemonik untuk mencapai tujuan nasional dengan menggunakan kekuatan militer secara sepihak (Ashraf, 2023).

Munculnya Tiongkok sebagai Kekuatan Global

Meningkatnya persoalan mata uang dolar pada sistem keuangan internasional, menurunnya kekuatan ekonomi, status dan citra Amerika di seluruh dunia sebagai akibat dari kelemahan strategi global Amerika yang terjadi secara signifikan sejak peristiwa 9/11 melemahkan hegemoni AS. Keadaan ini menunjukkan era unipolar akan segera berakhir dengan kemunculan negara adidaya baru, yaitu Tiongkok yang akan mengubah sistem internasional dari Sistem Unipolar yang dikuasai oleh Amerika Serikat menjadi Sistem Multipolar (Ashraf, 2023). RRC atau Tiongkok berdiri pada 1 Oktober 1949 oleh Mao Zedong sebagai negara komunis dengan satu partai. Dari beberapa negara yang terlihat kekuatannya untuk bersaing dengan AS, Tiongkok menjadi negara yang menyaingi dan sangat mungkin dapat mengalahkan AS. Sektor ekonomi yang berkembang pesat menjadi kekuatan besar Tiongkok sejak munculnya reformasi pasar pada pertengahan tahun 1970 di dalam kepemimpinan Deng Xiaoping. Tingkat pertumbuhan tahunan Tiongkok dua kali lipat melebihi angka yang dicapai Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Pada tahun 2009 Tiongkok menjadi negara eksportir terbesar di dunia dan tahun 2010 berhasil melampaui Jepang. Tingkat pertumbuhan yang konsisten sebesar 10% per tahun selama 30 tahun berturut-turut menjadikan Tiongkok negara perdagangan, eksportir, dan importir terbesar kedua di dunia. Tiongkok terus berkembang dan menjadi negara kedua di bawah AS yang mengeluarkan anggaran besar dalam belanja senjata. Kekuatan struktural Tiongkok semakin berkembang terbukti pada pengaruhnya dalam G-20, perannya dalam WTO, dan konferensi perubahan iklim kopenhagen tahun 2009. Memiliki jumlah tenaga kerja kompeten menjadikan Tiongkok sebagai jantung manufaktur dunia ekonomi. Status hegemoni AS menjadikan Tiongkok memiliki kekuatan global, namun tanggung jawab global tetap dipegang oleh Amerika Serikat dalam mengatur respons internasional. Tiongkok lebih tertarik untuk bertindak bersama dengan negara-negara lainnya (Heywood, 2011).

Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, Tiongkok dianggap sebagai negara yang meraih pertumbuhan ekonomi cukup pesat. China menjalin kerjasama dengan kawasan di luar Asia Timur, seperti China-Pakistan, China-ASEAN, China-Chile, serta China-Selandia Baru. melalui kerjasama ini China berhasil dalam memperluas pertalian dagang dan ekspansi

ekonomi. Pertumbuhan GDP China dalam kurun waktu 30 tahun mencapai hampir 10% menjadikan China sebagai negara eksportir dan manufaktur terbesar di dunia. Dengan menerapkan kebijakan terbuka, China melakukan perluasan dalam jaringan pasar saham internasional yang menunjukkan China berada di posisi ketujuh sebagai negara dengan devisa terbesar dan pusat perbankan internasional. China memiliki ambisi menjadikan mata uang Yuan sebagai nilai tukar perdagangan global. Upaya yang kemudian dilakukan China adalah menyalahkan AS atas kerangka peraturannya yang dianggap sebagai alasan timbulnya resesi ekonomi global. China juga menyerukan untuk menjadikan dollar sebagai cadangan mata uang dunia saja (Suharman dan Pramono, 2021). Kekhawatiran AS terhadap pesatnya kebangkitan Tiongkok dan penurunan status hegemoni menjadi alasan terjadinya perang dagang yang dilancarkan AS dengan Tiongkok. Era multipolar semakin terlihat ketika terjadinya perang dagang antar dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia ini. Pemerintah Amerika era Trump mengenakan tarif pajak sebesar 25% terhadap impor barang Tiongkok senilai \$34 miliar menyusul dengan tarif yang telah diatur pada produk aluminium, baja, dan panel surya. Pemerintah Tiongkok membalas dengan mengenakan tarif pajak sebesar 25% terhadap barang impor AS, seperti kacang kedelai dan produk pertanian lainnya. AS juga mengenakan tarif sebesar 10% kepada produk Tiongkok yang senilai sekitar \$200 dan mungkin akan semakin meningkat hingga 25% pada akhir 2018.

Kekuasaan Tiongkok yang berkembang pesat menimbulkan persaingan dengan AS di banyak bidang yang semakin memperkuat Tiongkok dalam teknologi, militer dan ekonominya memberikan ancaman pada hegemoni global AS. Pada 2013, era kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok mengeluarkan agenda kebijakan *Belt and Road Initiative (BRI)* yang disebut “sabuk ekonomi jalur sutra dan jalur sutra maritim abad 21” BRI dibentuk dengan tujuan menghubungkan Asia, Afrika dan Eropa untuk mempromosikan kerja sama ekonomi regional, pembangunan infrastruktur, dan perdamaian dunia. BRI berguna untuk mendorong perekonomian dan kemakmuran negara-negara di sepanjang wilayah Belt and Road melalui kerja sama ekonomi regional. Pembentukan BRI pada dasarnya sebagai upaya Tiongkok dalam mengubah perdagangan global sesuai dengan kepentingan dan secara luas memproyeksikan kekuatan Tiongkok itu sendiri. BRI tidak hanya sekedar rencana menghubungkan jalur darat dan laut wilayah Eurasia dan Afrika atau Indo-Pasifik namun sebagai strategi Tiongkok untuk menyusun peraturan baru terkait tata kelola ekonomi global (Kim, 2019).

Semakin berkembangnya prestasi Cina diiringi dengan penurunan produktivitas dalam bidang ekonomi Amerika Serikat. AS mengalami krisis keuangan pada tahun 2016 disebabkan besarnya utang AS pada tahun 2015 yang menyentuh US\$ 62 Triliun. Pada masa perang dingin, AS sangat memperlihatkan perbedaannya dengan Uni Soviet pada aspek ideologi dan kepentingannya. Namun ketika dengan China, AS menganggap China sebagai pihak menguntungkan dalam sektor ekonomi khususnya perdagangan. Namun dalam sektor keamanan, AS menilai China sebagai pesaing yang akan merusak kawasan-kawasan kekuasaan AS, yakni Asia-Pasifik. Mantan presiden AS, Donald Trump menyatakan akan mendapatkan kembali kekuasaan dan kehormatan dengan dominasi atas seluruh negara. Upaya tersebut diawali membentuk strategi terbaru, yakni *National Security Strategy (NSS)* yang menyatakan bahwa China merupakan pihak penentang dan penghalang kedigdayaan AS. China memberikan klaim bahwa sebagian besar dari wilayah Laut Cina Selatan adalah batas resmi dari wilayahnya melalui Garis Dash-9 yang dibuat oleh partai komunis pada 1953 menyulut konflik perbatasan dengan berbagai pihak seperti ASEAN dan juga Amerika Serikat. AS dengan sekutunya memberikan respon klaim China dengan melakukan patroli di wilayah Laut Cina Selatan dengan tujuan menjaga kebebasan navigasi dalam kawasan tersebut. China beberapa kali melakukan pembangunan pulau buatan, reklamasi, dan

pembangunan pangkalan militer di wilayah Laut Cina Selatan. Hal ini dilakukan sebagai strategi China untuk mencegah pengepungan yang akan dilakukan AS.

Rivalitas yang terlihat antara AS dengan China adalah kedua negara ini saling mengoperasikan Armada Tempur Angkatan Laut di Laut Cina Selatan. Di Indonesia sebagai negara netral yang memiliki perbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan mendapatkan pengaruh atas rivalitas antara AS dan China. Dalam menanamkan dan memperluas kekuasaannya, AS memberikan bantuan kerjasama militer melalui penawaran akuisisi peralatan alat tempur canggih, seperti *F-15EX Strike Eagle* dan pesawat tiltrotor MV-22 Osprey. Sedangkan Tiongkok menempuh jalan melalui sektor ekonomi dengan menawarkan bantuan investasi keuangan terhadap Indonesia, salah satunya dalam proyek pembangunan kereta cepat Jakarta - Bandung di dalam naungan PT KCIC. Harmonisnya hubungan antara Indonesia dengan Tiongkok meningkatkan antisipasi dari pihak AS. untuk melindungi kepentingan ekonominya, yakni pengelolaan tambang yang dilakukan di PT Freeport Papua, AS membangun pangkalan marinir di Australia tepatnya di wilayah Darwin yang memiliki jarak sangat dekat dengan pulau Papua sejak 2012 silam (Adiwilaga dkk, 2023).

KESIMPULAN

Pengaruh hegemoni Amerika Serikat terhadap dinamika politik global dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dominasi militer Amerika Serikat menjadi landasan strategi utama dalam mempertahankan posisi hegemoninya. Intervensi militer unilateral di berbagai negara, termasuk Somalia, Afghanistan, dan negara-negara lain, menunjukkan kekuatan militer AS dalam mengejar kepentingan politiknya di berbagai belahan dunia. Kedua, dimensi politik hegemoni Amerika Serikat tercermin dalam upaya melawan terorisme, seperti melalui kebijakan *Global War on Terror (GWOT)* yang diluncurkan setelah peristiwa 9/11. Namun, intervensi militer AS dalam perang melawan terorisme juga menimbulkan kontroversi dan dampak negatif, terutama dalam hal krisis keuangan dan peningkatan sentimen anti-Amerika di beberapa wilayah. Ketiga, hegemoni Amerika Serikat tercermin dalam perubahan kebijakan luar negeri, seperti negosiasi perdamaian dengan kelompok Taliban di Afghanistan.

Meskipun AS berhasil mencapai kesepakatan damai, kegagalan membentuk Afghanistan menjadi negara demokrasi yang stabil menunjukkan adanya keterbatasan dalam mempertahankan hegemoni politiknya. Terakhir, pengaruh hegemoni AS juga terlihat dari respons global terhadap tindakan dan kebijakan AS, yang mencerminkan pergeseran dalam dinamika politik global. Dengan demikian, pengaruh hegemoni Amerika Serikat terhadap dinamika politik global melibatkan berbagai aspek, mulai dari dominasi militer hingga respon terhadap kebijakan luar negeri AS, yang secara keseluruhan mempengaruhi tatanan politik global.

Dinamika politik multipolar dalam melihat kebangkitan Tiongkok sebagai pesaing hegemoni Amerika Serikat mencerminkan perubahan signifikan dalam tatanan geopolitik global. Pertama, penurunan kekuatan ekonomi, status, dan citra Amerika Serikat pasca-9/11 telah melemahkan hegemoni AS, membuka jalan bagi kemunculan Tiongkok sebagai kekuatan global yang signifikan. Tiongkok, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan inisiatif seperti *Belt and Road Initiative (BRI)*, telah menempatkan dirinya sebagai pesaing serius terhadap AS. Kedua, perang dagang antara AS dan Tiongkok menandai rivalitas yang semakin meningkat antara kedua negara, mengilustrasikan persaingan dalam berbagai bidang termasuk teknologi, militer, dan ekonomi. Ketiga, Tiongkok menegaskan ambisinya untuk menciptakan sistem ekonomi global baru yang lebih sesuai dengan kepentingannya,

dengan upaya seperti mempromosikan yuan sebagai nilai tukar perdagangan global dan menyalahkan AS atas resesi ekonomi global.

Terakhir, dinamika politik di kawasan Asia-Pasifik, khususnya terkait dengan Laut Cina Selatan, menjadi panggung utama rivalitas antara AS dan Tiongkok, mempengaruhi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, AS dan Tiongkok menggunakan berbagai instrumen, baik militer maupun ekonomi, untuk memperkuat pengaruh mereka di kawasan tersebut, menciptakan ketegangan dan mengarah pada pembentukan aliansi dan respons strategis dari negara-negara lain. Kesimpulannya, dinamika politik multipolar yang melihat kebangkitan Tiongkok sebagai pesaing hegemoni AS mencerminkan pergeseran kekuatan dalam sistem internasional dan menimbulkan beragam implikasi bagi tatanan geopolitik global.

DAFTAR PUSTAKA

- Absor, N. F., Hidayat, A., & Permana, R. (2022). Kebangkitan Tiongkok Sebagai Raksasa Baru Dunia Tahun 1976-2013. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 16-34.
- Adiwilaga, R., Kusumah, P., & Mustofa, M. U. (2023). Implikasi Rivalitas Amerika Serikat - Republik Rakyat China Terhadap Posisi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus pada Dinamika Konflik Klaim Wilayah Laut Cina Selatan). *Jurnal Politik, Keamanan, dan Hubungan Internasional*. 2 (1). 30-36.
- Anugerah, B. dan Purba, J. (2021). Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di bawah Rezim Taliban dan Signifikansinya terhadap Geopolitik Global. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. 9 (3). 17-29.
- Ashraf, N. 2023. Revisiting international relations legacy on hegemony: The decline of American hegemony. *Review of Economics and Political Science*. 8 (6).
- Enh, A. M., & Hamzah, Z. V. (2011). Persaingan Amerika Syarikat–Soviet Union dalam Pembentukan Order Baru Pasca Perang Dunia II. *SOSIOHUMANIKA*, 4(1).
- Gramsci, A. 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Haass, R. N. (2008). The age of nonpolarity: what will follow US dominance. *Foreign affairs*, 44-56.
- Hasyaimi, M. A. (2016). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Untuk Menciptakan Stabilitas Hegemoni pada Era Pasca Perang Dingin. *Jurnal Global and Policy*. 3 (2). 115-117.
- Heywood, A. (2011). *Global Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hussein, S. (2013). Eksistensi Amerika Serikat sebagai Kekuatan Global. *Jurnal Global and Policy*. 1 (1). 85-86.
- Kim, Min-hyung. 2019. A Real Driver of US–China Trade Conflict: The Sino–US competition for global hegemony and its implications for the future. *International Trade, Politics and Development*. 3 (1). 30-35.
- Putra, A. T., Priambodo, B., Manggalou, S., & Indarto, E. K. (2023). Hegemoni Amerika Serikat di Afghanistan: Economic Turmoil and Food Insecurity Dilemma. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 5(2), 198-206.
- Safitri, I. A. (2014). Pemberian Bantuan Amerika Serikat kepada Somalia sebagai Bentuk Pembendungan Kekuatan Cina di Afrika. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. 3 (1). 262-265.
- Suharman, Y. dan Pramono, S. (2021). Strategi Kebangkitan Ekonomi Tiongkok dan Pendekatan *Long Cycle* Transisi Kekuasaan Politik Dunia
- Yuanita, A. Z., Ribawati, E., & Sumantri, T. N. A. (2024). Kondisi Amerika Setelah Perang Dingin Berakhir. *Bersatu: Jurnal Pendidikan Bhinneka Tunggal Ika*. 2(1), 171-179.